

DESAIN PEMBERDAYAAN PROTOKOL CHSE (CLEAN, HEALTH, SAFETY & ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY) DI KAWASAN GEOPARK CILETUH PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

Ahmad Yani¹; Asep Mulyadi²; Rosita³

¹) Program Studi Pendidikan Geografi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

²) Program Studi Pendidikan Geografi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

³) Program Studi manajemen Resort and Leisure, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

¹Email: ahmadyani@upi.edu

Abstract: *The purpose of this study is to develop a design for the empowerment of the CHSE (Clean, Health, Safety & Environmental Sustainability) protocol by taking a study in the Ciletuh Palabuhanratu Geopark Area, Sukabumi Regency, West Java Province. This area has been awarded the UNESCO Global Geopark (UGGp) predicate since April 17, 2017. This research uses a qualitative method, namely action research. The research subjects of Pokdarwis members of Sukabumi Regency as targets for community empowerment. The implementation is carried out for two years, namely 2021 and 2022. This study only reports the success of the first of the three stages of action research. The research product reported is a CHSE protocol empowerment design for the community in the Ciletuh Palabuhanratu Geopark Area. Based on the results of the empowerment, Pokdarwis sets the priority of activities in the second stage of empowerment, namely in the form of guide training and guide certification as well as expanding Pokdarwis membership in each Geopark area destination. In order to maintain the sustainability of destinations, an Ecotourism Internal Quality Audit (EIQA) system is also needed for each destination. As a consequence of the results of the early stages of empowerment, greater attention is needed from the parties, especially the local government and geopark management bodies to the community who voluntarily care about developments in their area, including the Tourism Awareness Group.*

Keyword: *City CHSE, Ciletuh, Geopark, Empowerment, Pokdarwis*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah ingin mengembangkan suatu desain pemberdayaan protokol CHSE (*Clean, Health, Safety & Enviromental Sustainability*) dengan mengambil studi di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini sudah memperoleh predikat UNESCO Global Geopark (UGGp) sejak pada 17 April 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu action research. Subjek penelitian para anggota Pokdarwis Kabupaten Sukabumi sebagai sasaran antara pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan dilakukan selama dua tahun yaitu 2021 dan 2022. Penelitian ini hanya melaporkan keberhasilan pada tahap pertama dari tiga tahap penelitian tindakan. Produk penelitian yang dilaporkan adalah sebuah desain pemberdayaan protokol CHSE bagi masyarakat di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Berdasarkan hasil pemberdayaan, Pokdarwis menetapkan prioritas kegiatan pada tahap kedua pemberdayaan yaitu berupa pelatihan guide dan sertifikasi guide serta memperluas keanggotaan Pokdarwis di setiap destinasi kawasan Geopark. Dalam rangka menjaga kelestarian destinasi, dibutuhkan pula sistem Audit Mutu Internal Ekowisata (AMIE) terhadap setiap destinasi. Sebagai konsekuensi dari hasil pemberdayaan tahap awal, dibutuhkan perhatian yang lebih besar dari para pihak terutama pemerintah daerah dan badan pengelola geopark terhadap komunitas masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap perkembangan di daerahnya, termasuk di dalamnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Kata kunci: *CHSE, Ciletuh, Geopark, Pemberdayaan, Pokdarwis*

PENDAHULUAN

Suatu daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan geopark, apalagi telah mendapat pengakuan dunia internasional, memiliki peluang perkembangan wilayah tanpa merusak lingkungan alam dan budaya setempat. Asumsi ini dapat diterima, karena sejak “diciptakan” konsep geopark adalah bertujuan untuk melindungi suatu kawasan (yang unik) sebagai warisan dunia. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) sebagai organisasi pemberi sertifikat geopark global seolah-olah menitipkan kawasan tersebut kepada masyarakat setempat untuk menjaganya; jangan sampai rusak. Namun karena masyarakat yang ada di dalamnya membutuhkan penghidupan, maka pemanfaatan lingkungan hidup masih diperbolehkan “sebatas” untuk kegiatan pariwisata. Jadi konsepnya jangan dibalik, penetapan kawasan geopark seolah-olah mendapat izin eksploitasi lingkungan hidup melalui kegiatan wisata.

Konsekwensi dari pengertian di atas, pengelolaan kawasan geopark tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kawasan industri pariwisata. Di kawasan industri pariwisata, diperbolehkan untuk dibangun hotel berbintang, topografi permukaan bumi dapat dilenyapkan karena tidak dibutuhkan dalam pembangunan kawasan. Masyarakat sekitar dapat “diusir” demi pembangunan kawasan wisata. Kasus pembatasan masyarakat setempat untuk akses ke pantai-pantai indah (untuk mencari ikan) banyak dijumpai, karena garis pantai tersebut telah dipagari oleh hotel-hotel berbintang. Di kawasan geopark, kondisi tersebut tidak boleh terjadi. Pengembangan kawasan geopark harus dilakukan secara khusus melalui perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi. Para investor atau masyarakat setempat tidak dapat sembarangan memanfaatkan lahan tanpa memperhatikan peruntukan yang telah direncanakan dalam tata ruang kawasan. Penataan ruang di kawasan geopark harus berorientasi pada lima dimensi sekaligus, yaitu berorientasi pada perlindungan keunikan geologi, keunikan flora dan fauna endemik, keunikan budaya lokal, pengembangan ekonomi masyarakat (melalui pengembangan industri pariwisata), dan pengembangan pendidikan.

Seiring dengan penataan ruang kawasan geopark, perilaku dan budaya masyarakat setempat juga harus dibina agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keunikan budaya setempat. Salah satu perilaku masyarakat yang dibutuhkan (mendesak) di kawasan geopark adalah perilaku yang memperhatikan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan yang dikenal dengan protokol CHSE (*Clean, Health, Safety & Environmental Sustainability*). Program CHSE intensif disosialisasikan pada saat pandemi COVID-19 sebagai bentuk perlindungan masyarakat di sejumlah titik kunjungan yaitu di hotel, pondok wisata/homestay, restoran, kegiatan MICE, rumah makan, kegiatan berwisata, dan pada saat bermobilitas (jasa transportasi).

Walaupun tidak diwajibkan, namun program CHSE sangat dianjurkan bagi pelaku usaha yang telah disebutkan. Hotel-hotel yang memiliki kemampuan manajemen memadai, telah menerapkan protokol CHSE secara baik namun bagi sebagian pelaku usaha yang belum memiliki manajemen yang baik tidak dapat melaksanakan protokol CHSE. Penelitian ini mengajukan suatu desain pembudayaan CHSE bagi masyarakat yang berada di kawasan geopark dengan mengambil kasus di Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Asumsi yang dibangun dalam penelitian adalah bahwa protocol CHSE sangat baik. Jika setiap komponen pelaku usaha dan masyarakat di kawasan Geopark dapat melaksanakan protocol CHSE dengan baik, maka misi geopark dapat terwujud. Sebagaimana diketahui, aspek *Environmental Sustainability* memiliki arti yang luas yaitu pelaku usaha dan masyarakat ikut serta dalam menjaga lingkungan hidup. Suatu kawasan wisata sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, jika CHSE dapat dijalankan dengan baik maka akan memiliki kontribusi terhadap kelestarian lingkungan di kawasan geopark.

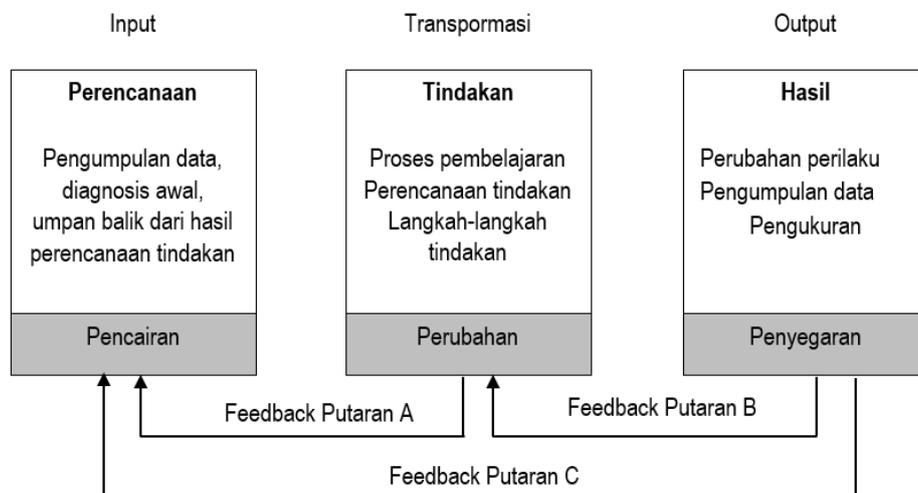
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu *action research* atau sering disebut *participatory research* (penelitian partisipatif). Dalam pendekatan ini, masyarakat sebagai sasaran antara pemberdayaan dilibatkan dalam setiap tahap proses penelitian. Peneliti sebagai pihak luar mempunyai

fungsi ganda yaitu pengamat terhadap proses sosial yang berjalan dan sekaligus terlibat dalam program yang dijalankan. Ciri utama dari *action research* adalah adanya siklus perbaikan dari tindakan sebelumnya. Penelitian tindakan ini dianggap tepat karena dapat menemukan solusi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Moen dan Solvberg 2012; Nicodemus, & Swabey, 2015; Stringer 2014). Pendekatan tindakan dilakukan secara kemitraan antara masyarakat yang akan diberdayakan dengan pihak luar (pelaksana pemberdayaan yang berperan sebagai peneliti).

Dari sekian banyak model penelitian tindakan, penelitian ini mengacu pada model Lewin (1958) yaitu melalui tahapan:

1. Tahap pertama dimulai dengan perencanaan yang diprakarsai oleh pihak peneliti dan masyarakat. Kegiatan perencanaan diawali dari diagnosis masalah, pengumpulan data, umpan balik, dan rencana tindakan bersama.
2. Tahap kedua adalah tahap tindakan atau transformasi. Tahap ini mencakup tindakan yang terus diamati sebagai proses pembelajaran. Selama tindakan, tentu akan ada tanggapan dari masyarakat dan atau pihak-pihak tertentu. Hal ini perlu catat untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pada siklus berikutnya.
3. Tahap ketiga, adalah menilai keluaran atau hasil. Tahap ini mencakup perubahan sosial atau produk pemberdayaan lainnya.



Gambar 1: Siklus Penelitian Tindakan (Lewin, 1958)

Subjek penelitian para anggota Pokdarwis Kabupaten Sukabumi yang berjumlah 20 orang. Pelaksanaan dilakukan selama dua tahun yaitu 2021 dan 2022. Dari model Lewin, penelitian ini hanya melaporkan keberhasilan pada tahap pertama dari tiga tahap penelitian tindakan. Pada tahun pertama, dihasilkan suatu gambaran umum tentang wawasan pengetahuan anggota Pokdarwis tentang CHSE sebagai baseline kompetensi para pelaksana pemberdayaan. Tahun kedua menghasilkan diagnosis masalah, pengumpulan data awal (preliminari), umpan balik dan rencana tindakan bersama. Dengan demikian, produk penelitian yang dilaporkan adalah sebuah desain pemberdayaan protokol CHSE (*Clean, Health, Safety & Environmental Sustainability*) bagi masyarakat di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu sebagai tindakan tahap pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Pokdarwis Kabupaten Sukabumi

Potensi wisata di Geopark Ciletuh Palabuhanratu sangat besar. Lokasinya berada di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data, Kawasan Ciletuh meliputi 126.100 hektar yang terbagi atas 74 desa dalam 8 kecamatan. Di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan ratu tersebar 50 objek wisata.

Seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan, hal yang perlu diwaspadai adalah dampaknya terhadap ancaman kelestarian lingkungan di sekitar lokasi wisata. Kawasan ini sudah memperoleh predikat UNESCO Global Geopark (UGGp) sejak pada 17 April 2017 dan berlaku hingga 17 April 2022. (www.republika.co.id, 3 Januari 2021).

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Geopark Ciletuh Palabuhanratu sebagai Geopark Global (CPUGGp) adalah mempertahankan statusnya sebagai geopark global. Banyak komponen status geopark yang harus dipertahankan, salah satunya memelihara kelestarian lingkungan dan menjamin keselamatan para pengunjung. Dari besarnya bidang garapan, di tengah masyarakat terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang secara langsung maupun tidak langsung, ikut aktif membantu pihak pengelola memberi penyadaran kepada masyarakat yang ada di kawasan geopark.

Usaha yang masih konsisten oleh Pokdarwis, antara lain kampanye anti sampah plastik yang telah bermitra dengan dinas terkait dan menggandeng Jamkrindo yang selanjutnya dibarengi dengan implementasi bank sampah. Sehingga sampah yang bisa diolah bisa menekan produksi sampah yang dihasilkan. Pokdarwis Kabupaten Sukabumi telah ikutserta dengan badan pengelola melakukan pembuatan landmark atau simbol supaya bisa menjadi *top of mind* pengunjung, penataan pasar ikan Ciwaru agar lebih menarik dan menjadi pusat kuliner seafood di Ciwaru, pembuatan pusat UMKM *Smart*, dan penyediaan air bersih khususnya di Kecamatan Waluran untuk mengantisipasi dampak kekeringan.

Mengawali upaya pemberdayaan masyarakat tentang CHSE, pada tahun pertama telah diperoleh data tingkat pemahaman anggota Pokdarwis tentang pemahaman terhadap ekoliterasi dan CHSE (*Clean, Health, Safety & Enviromental Sustainability*). Data diperoleh sebelum dan setelah pelatihan ekoliterasi. Jumlah yang mengikuti test ada 25 orang anggota Pokdarwis. Dengan asumsi bahwa pemahaman ekoliterasi dan CHSE komponen masyarakat peduli geopark yang masih rendah, maka tentu saja perlu ditingkat kembali pemahamannya tentang tentang pelestarian lingkungannya (ekoliterasi). Namun pada test di tahun kedua mengalami kenaikan.

Tabel 1 Hasil Pretest dan Postes Ekoliterasi

No	Topik	Nilai Rata-Rata			
		Pretest	Postest	Gain	%
1	Konsep Ekoliterasi	5,7	6,8	1,1	20,37
2	Sustainable tourism	6,1	7,8	1,7	31,48
3	Sadar Wisata & Sapta Pesona	7,3	7,9	0,6	11,11
4	Faktor keberhasilan dan kegagalan penerapan CHSE	6,4	7,3	0,9	16,67
5	Keterampilan pengembangan alat sosialisasi	6,7	7,8	1,1	20,37
Rata-Rata		6,44	7,52	1,08	

Sumber: Survey, 2021

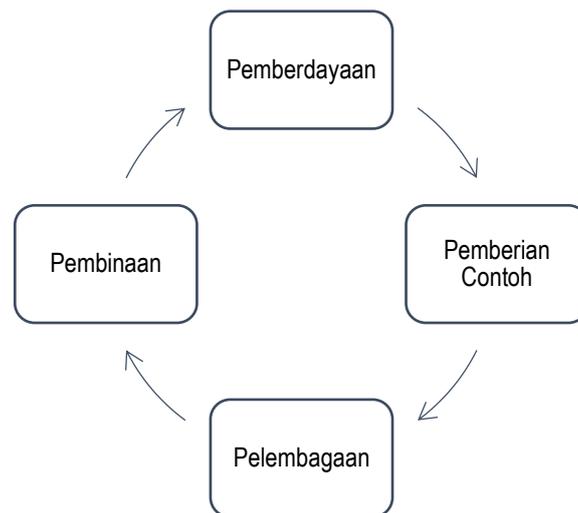
Ragam Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam program pemberdayaan, masyarakat adalah subjek utama dan bukan objek pemberdayaan. Masyarakat dibantu dan diajak secara bersama-sama untuk dapat “menolong dirinya sendiri” dalam mejalani kehidupan pembangunan daerahnya. Karena itu, pada proses pemberdayaan, pelibatan masyarakat harus menjadi keharusan. Pemberdayaan bukan pihak luar yang bekerja, sedangkan masyarakat hanya menonton. Jika terjadi demikian, maka jangan harap tidak akan ada perubahan yang signifikan, bahkan tidak akan keberlanjutan. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan (empowering) antara lain keterlibatan dalam merancang, melaksanakan, monitoring, bahkan mempertanggungjawabkan di akhir program.

Prinsip pembedayaan lainnya adalah pemanfaatan kelompok-kelompok yang telah ada di masyarakat, baik dalam bentuk pemerintah formal, maupun kelompok-kelompok informal seperti organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat tertentu, atau pemanfaatan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Pendekatan kelompok dianggap paling efektif, karena program aaakan mudah difahami oleh msasyarakat jika disampaikan oleh kelompok masyarakat yang mereka kenal. Bentuk kerjasama antara

pelaksana pemberdayaan dengan kelompok masyarakat adalah dalam bentuk kemitraan. Dengan demikian, program dapat dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang terikat kemitraan.

Dari sekian banyak pendekatan pemberdayaan, namun ada pola yang umumnya digunakan yaitu melalui siklus spiral pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan sumber daya manusia, pemberian contoh, pelembagaan, dan pembinaan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui proses penyadaran, pelatihan, pengembangan kepemimpinan, dan mengembangkan perilaku dan budaya sesuai tuntutan program. Tahap kedua adalah pemberian contoh yaitu mewujudkan suatu bentuk kegiatan sebagai contoh, prototype, atau model yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tahap ketiga adalah melakukan pelembagaan dari upaya yang telah dilakukan. Bentuk pelembagaan, misalnya terbentuknya Pokdarwis (kelompok sadar wisata). Pokdarwis adalah bentuk pelembagaan dari usaha panjang dalam mewujudkan lingkungan destinasi wisata di berbagai daerah. Tahap akhir siklus adalah pembinaan dari apa yang telah dikembangkan.



Gambar 2: Pola pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemilihan program pemberdayaan masyarakat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Acceptable* yaitu mudah diterima oleh masyarakat. Untuk dapat diterima, maka program tidak boleh bertentangan dengan norma adat atau istiadat setempat. Selain itu, program yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi setempat;
2. *Accountable* yaitu terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya program harus dapat difahami latar belakang dan secara terbuka dijelaskan maksud dan tujuan program pemberdayaan. Masyarakat pada dasarnya tidak mau “dipolitisir” atau diperdaya, karena itu harus clear dan terbuka;
3. *Profitable* artinya memberikan keuntungan bagi masyarakat. Program harus menguntungkan baik langsung maupun tidak langsung.
4. *Sustainable* yaitu dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga program benar-benar terwariskan dengan baik.
5. *Replicable* yaitu mudah “dikembangbiakkan” melalui gagasan yang muncul dari masyarakat sehingga program terus berkembang.

Lima prinsip di atas berlaku untuk semua kondisi masyarakat baik di desa maupun di kota. Kelima prinsip di atas mungkin tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, namun ada satu contoh pemberdayaan yang tidak dapat ditinggal dari kelimanya yaitu pada saat pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata. Hal itu karena peran serta seluruh masyarakat desa harus terlibat. Pembangunan dan pengembangan desa wisata sejalan dengan keberlangsungan alam, sosial dan budaya yang memanfaatkan sumberdaya lokal, pencapaian kesejahteraan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Rusyidi & Fedryansah, 2018; Wijaya, 2018). Jika tidak terpenuhi prinsip di atas, maka alih-

alih akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, justru akan menimbulkan kerusakan ikatan sosial masyarakat desa.

CHSE dan Ekoliterasi Kepariwisata

CHSE adalah singkatan *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan. CHSE merupakan program sertifikasi untuk fasilitas dan kegiatan wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagi para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti bidang jasa transportasi wisata, hotel/*homestay*, rumah makan/restoran, hingga *Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions (MICE)* disarankan mengikuti sertifikasi CHSE untuk mengurangi persebaran Covid-19.

Pada aspek kebersihan, pelaku usaha harus memastikan kebersihan pada tempat usahanya. Indikatornya meliputi usaha penyediaan alat-alat keberhasihan seperti tempat cuci tangan, tempat sampah, kebersihan toilet, dan terbebas dari sampah. Pada komponen kesehatan, pelaku usaha perlu menjaga kesehatan baik para pekerja maupun pengunjung. Dalam masa pandemic, misalnya perlu asupan yang cukup, istirahat yang cukup, dan rajin olah raga. Jika memungkinkan terdapat peralatan dan perlengkapan kesehatan sederhana, ruang publik dan ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik, dan penanganannya bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.

Dalam aspek keselamatan, pelaku usaha perlu menyiapkan prosedur penyelamatan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana atau kondisi darurat yang tidak diinginkan. Misalnya terdapat petunjuk arah evakuasi, titik kumpul jika terjadi gempa bumi, alat pemadam kebakaran, dan ketersediaan media atau alat komunikasi dalam penanganan kondisi darurat. Terakhir, pada aspek kelestarian lingkungan diharapkan pelaku usaha memastikan bahwa usahanya telah menerapkan kondisi yang ramah lingkungan. Misalnya poster untuk memanfaatkan air dan sumber energi secara efisien, sehat demi menjaga keseimbangan ekosistem. Pengolahan sampah dan limbah cair dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan, dan kondisi lingkungan sekitar asri dan nyaman, baik secara alami atau dengan rekayasa teknis.

Dari sejumlah referensi tentang CHSE, khususnya pada aspek kelestarian lingkungan indikator atau lingkup kegiatannya relatif terbatas, artinya belum masuk wilayah kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Berikut adalah rincian tuntutan kelestarian lingkungan pada CHSE:

1. Penggunaan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan;
2. Pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien, sehat demi menjaga keseimbangan ekosistem;
3. Pengolahan sampah dan limbah cair dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan;
4. Kondisi lingkungan sekitar asri dan nyaman, baik secara alami atau dengan rekayasa teknis;
5. Pemantauan dan evaluasi penerapan panduan dan SOP Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

Rincian tuntutan di atas merupakan perilaku kepedulian lingkungan yang bersifat individual dan atau paling maksimal pada tata tertib yang diberlakukan pada setiap unit-unit usaha dan kegiatan wisata. Adapun masalah utama dari kelestarian lingkungan hidup seperti degradasi lahan, perubahan fungsi lahan hutan, dan tata kelola sampah pada tingkat kabupaten/provinsi, belum tersentuh dalam sertifikat CHSE.

Untuk mengembangkan protocol CHSE dibutuhkan suatu pemahaman ekoliterasi. Ekoliterasi adalah pemahaman dan kesadaran seseorang tentang peranan lingkungan dalam kehidupan manusia. Meena dan Alison (2009) menyatakan bahwa ekoliterasi tidak sebatas pemahaman terhadap konsep ekologi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Gagasan tentang ekoliterasi berasal dari Capra (1999), semakin populer karena ancaman terhadap lingkungan semakin kuat. Semua lahan di kawasan wisata cenderung mengalami degradasi daripada membaik. Hal ini dapat difahami karena jumlah penduduk semakin meningkat sehingga eksploitasi terhadap alam semakin tidak terkendali.

Ekoliterasi terdiri dari dua kata yaitu ekologi dan literasi. Ekologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kajian ekologi adalah ekosistem yaitu sebuah sistem kehidupan yang terdiri atas komunitas makhluk hidup (terdiri dari berbagai species) dan berbagai unsur tak hidup (faktor fisik) yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Jika pada satu komponen ekosistem mengalami gangguan baik menurunnya fungsi atau mengalami kerusakan, maka akan berdampak terhadap fungsi subsistem lain. Orang yang memahami tentang ekologi dan interaksi antar unsur ekosistem serta memiliki kemampuan untuk menjaga dan beradaptasi disebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan ekologis (Goleman, 1999). Gardner (2013) merumuskan kecerdasan ekologis sebagai kemampuan manusia dalam memahami gejala-gejala alam, memperlihatkan kesadaran ekologis dan menunjukkan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam.

Orang yang memiliki ekoliterasi akan berperilaku sama di manapun mereka berada. Mereka akan selalu peduli terhadap lingkungan baik dalam bentuk perilaku yang sepele seperti tidak membuang sampah sembarangan hingga perilaku yang memerlukan keberanian untuk mencegah orang lain yang akan merusak lingkungan hidup. Untuk berliterasi ekologi, tidak tergantung pada status sosial, karena setiap orang dapat menjalankannya. Orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha jasa kepariwisataan dapat melakukan kegiatan literasi.

Perilaku ekoliterasi yang paling sederhana di lingkungan destinasi pariwisata adalah tidak menyampah. Para usaha yang berada di kawasan destinasi menempatkan tempat usaha sesuai dengan peruntukannya. Tersedia petunjuk dan aturan yang tegas dalam memelihara keberadaan destinasi dalam lingkup ekosistem, artinya tidak hanya focus pada titik lokasi tertentu namun memelihara keberadaan lingkungan yang “membuat” lokasi tersebut tetap lestari. Sebagai ilustrasi, jika terdapat destinasi andalannya berupa wisata air terjun maka Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memasok aliran airnya harus tetap terjaga. Contoh lainnya, misalnya kemenarikan objek wisatanya adalah gisik pantai yang luas dan berpasir putih. Luas gisik tepi pantai menjadi andalan kemenarikannya. Agar objek tersebut tetap terjaga maka tentu saja tidak boleh dijadikan lapak pedagang kaki lima karena akan merusak keindahan pantai itu sendiri.

Perilaku ramah lingkungan diartikan sebagai perilaku yang memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari (Bechtel dan Chrchman, 2002). Perilaku ramah lingkungan adalah perilaku yang secara sadar berusaha menekan kemungkinan munculnya dampak negatif dari tindakan seseorang terhadap alam atau lingkungan yang terbangun secara fisik (Kollmuss & Agyeman, 2002). Pengertian ini penting untuk digarisbawahi karena terkadang kita tidak mampu mencegah pihak tertentu yang merusak lingkungan maka sikap peduli lingkungan adalah hanya menekan agar kerusakannya tidak terlalu besar. Kasus ini banyak terjadi di lingkungan kawasan objek wisata, misalnya dalam tata ruang destinasi wisata dilarang untuk dibangun bangunan yang permanen. Namun karena, yang membangunnya adalah yang “berkuasa” maka para pihak peduli lingkungan hanya dapat mengurangi kerusakan lingkungan menyarankan agar limbah dari bangunan tersebut agar tidak mencemari lingkungan destinasi wisata.

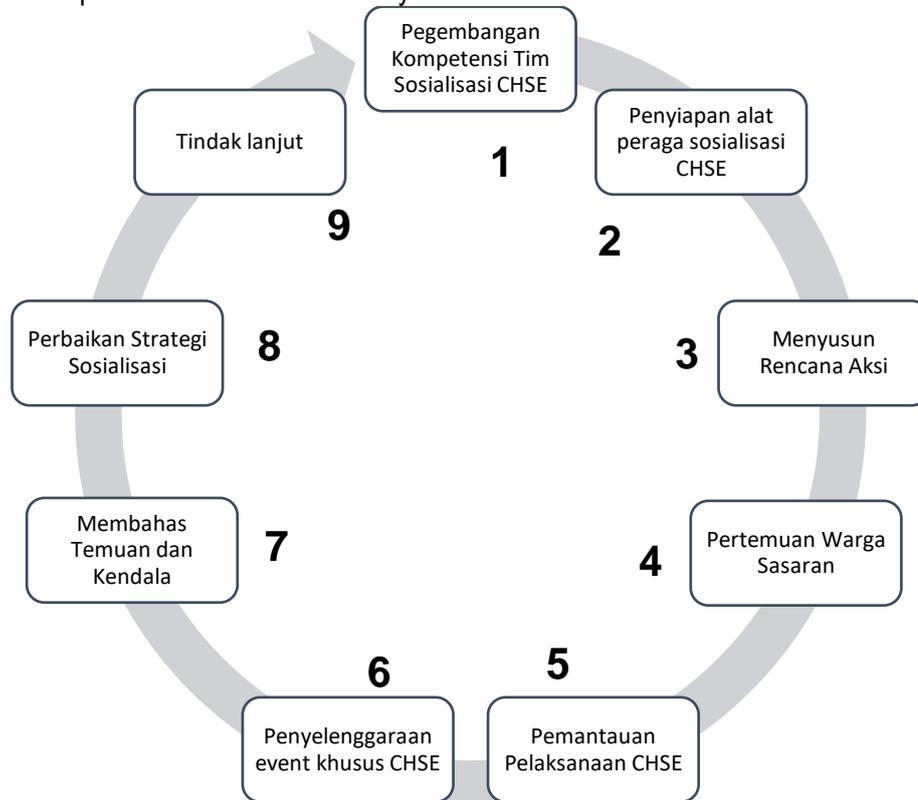
Desain Pemberdayaan Protokol Program CHSE

Dalam pengabdian tahun kedua, Pokdarwis didefinisikan sebagai kelompok yang akan menjadi “juru dakwah” program CHSE, khususnya pada komponen kelestarian lingkungan hidup. Hasil pendampingan, dirumuskan suatu konsep sosialisasi CHSE dengan Sembilan langkah yaitu:

- a. Pengembangan kompetensi Tim Sosialisasi CHSE. Pada pengabdian, tahap ini telah dilakukan pada tahun pertama.
- b. Penyiapan alat peraga sosialisasi CHSE. Tahap ini, pada tahun pertama pengabdian hanya pelatihan pembuatan alat peraga sosialisasi yaitu pelatihan membuat poster.
- c. Menyusun Rencana Aksi. Tahap ini telah dilakukan pada tahun kedua melalui pendampingan.
- d. Pertemuan warga sasaran.
- e. Pemantauan Pelaksanaan CHSE
- f. Penyelenggaraan event khusus

- g. Membahas temuan dan kendala
- h. Perbaiki strategi sosialisasi
- i. Tindak lanjut

Untuk tahap berikutnya, tim pelaksana pengabdian menyerahkan “amanat” kepada ketua Pokdarwis untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi. Jika tahun berikutnya, pengabdian dilanjutkan maka akan dilakukan pemantauan keberhasilannya.



Gambar 3: Desain Sosialisasi Program CHSE

Hasil Pemberdayaan

Hasil dari proses pengabdian yang kedua adalah program kerja yang dirumuskan bersama oleh anggota Pokdarwis. Dalam jadwal hanya dirancang untuk setengah hari yaitu dari pukul 13.00 – 15.00. Namun pihak peserta melanjutkannya di homestay, karena peserta disediakan penginapan untuk semalam. Berdasarkan pemantauan, hasil diskusi informal selama pelatihan yang dilanjutkan di penginapan diperoleh program kerja sebagai berikut:

- a. Pelatihan guide
Anggota dan pengurus Pokdarwis merencanakan mengadakan program pelatihan bagi pemandu wisata. Sebagian anggota Pokdarwis memiliki profesi sebagai pramuwisata, sehingga program Pokdarwis memprioritaskan untuk mengadakan pelatihan. Dalam pelatihan disarankan agar salah satu materinya tentang CHSE.
- b. Sertifikasi guide
Anggota Pokdarwis yang berprofesi sebagai pramuwisata (pemandu wisata) sebagian belum memiliki sertifikat pemandu, karena itu Pokdarwis mencoba mengusahakan membantu teman-temannya yang akan mengikuti sertifikasi pemandu wisata.
- c. Meninjau dan membentuk Pokdarwis di setiap destinasi
Kawasan Geopark Ciletuh dan Palabuhanratu sangat luas dan memiliki puluhan potensi destinasi wisata. Tidak semua destinasi memiliki komunitas Pokdarwis, karena itu pengurus Pokdarwis Kabupaten Sukabumi berencana untuk memantau dan membentuk Pokdarwis pada setiap destinasi

wisata di kawasan Geopark Ciletuh dan Palabuhanratu.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat relatif lancar, hal ini karena faktor pendukungnya cukup yaitu kedekatan tim pelaksana pengabdian dengan para pemangku kepentingan di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, khususnya Badan Pengelola Geopark dan Pengurus Pokdarwis. Kemudahan yang sangat dirasakan oleh tim adalah memperoleh calon peserta pelatihan dan menetapkan waktu pelatihan. Kehadiran peserta 100% dan narasumber 100% hadir. Dukungan lainnya yang juga sangat penting adalah pencairan dana dari LPPM Universitas Pendidikan Indonesia yang relatif cepat sehingga memudahkan dalam kegiatan pengabdian.

Kendala yang menghambat pembedayaan hampir tidak ada, semuanya dapat teratasi. Awalnya lokasi yang jauh dari pusat kota, diperkirakan akan menjadi penghambat bagi peserta untuk datang ke lokasi pelatihan (30 km). Sebagian peserta datang dari semua wilayah Geopark yaitu 126.100 hektar yang meliputi delapan kecamatan dan 74 desa. Namun nampaknya, peserta cukup senang dan mengikuti pelatihan dengan serius. Semua dapat dijalankan dengan baik, kecuali karena keterbatasan biaya maka pelaksanaan pengabdian hanya sebatas pada pelatihan di ruang kelas dan kunjungan ke lokasi wisata untuk latihan identifikasi sarana dan prasarana CHSE. Solusi yang diambil adalah dengan cara memadatkan acara. Idealnya ada kegiatan untuk melaksanakan survey ke setiap lokasi wisata dan potensi kerusakan lingkungan.

Dari hasil pembicaraan dengan pengurus Pokdarwis, mereka membutuhkan tiga kegiatan yang mendesak yaitu:

1. Pembentukan pengurus Pokdarwis di setiap desa di Kawasan Geopark. Jumlah desa di depalan kecamatan terdapat 74 desa, dan desa yang telah memiliki komunitas Pokdarwis baru 26 desa. Dari komunitas Pokdarwis di 26 desa “belum tersentuh” pembinaan yang berkelanjutan.
2. Pelatihan bagi anggota Pokdarwis yang berprofesi sebagai pemandu wisata membutuhkan pelatihan Geoliterasi (dan juga Ekoliterasi).
3. Dalam rangka menjaga kelestarian destinasi, dibutuhkan system Audit Mutu Internal Ekowisata (AMIE) terhadap setiap destinasi. Objek material AMIE adalah destinasi wisata dalam luasan Kawasan tertentu.

Khususnya untuk program AMIE, objek formal penilaian dalam sistem AMIE yang dikembangkan ini akan difokuskan kepada ketersediaan fasilitas, kinerja para pengelola dalam melahirkan produk-produk pariwisata, pemberian pelayanan jasa pariwisata, pemasaran, tata ruang, kegiatan konservasi, dan pelibatan unsur masyarakat. Aspek fasilitas yaitu penyediaan baerbagai fasilitas pokok dan pendukung. Lingkup fasilitas pariwisata yang dinilai adalah fasilitas aksesibilitas, hospitality, dan amenities.

Berdasarkan gambaran di atas, rencana tindaklajutnya akan dikonsultasikan kepada Badan Pengelola Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Yaitu untuk menentukan satu dari tiga pilihan yaitu pembentukan pengurus Pokdarwis di setiap desa di Kawasan Geopark; Pelatihan bagi anggota Pokdarwis; atau pengembangan sistem Audit Mutu Internal Ekowisata (AMIE).

SIMPULAN

1. Desain pemberdayaan protocol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*) memiliki nilai *compatible* dengan pengembangan kawasan Geopark secara berkelanjutan. *Output* pemberdayaan dapat mendidik masyarakat setempat untuk peduli terhadap pengembangan geopark sebagai ruang kehidupan yang harus dilestarikan.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai tema, tidak dapat meninggalkan kelompok-kelompok masyarakat yang telah ada sebelumnya. Mereka telah memiliki kepedulian lebih awal dibandingkan para “pahlawan” pemberdayaan yang berasal dari luar kawasan geopark.
3. Dibutuhkan perhatian yang lebih besar dari para pihak teruma pemerintah daerah dan badan pengelola geopark terhadap komunitas masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap perkembangan di daerahnya, termasuk di dalamnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

DAFTAR PUSTAKA

- Bechtel, R. B. & Churchman, A., 2002. *Handbook of Environmental Psychology*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Capra, F. (1999). *Ecoliteracy: The Challenge for the Next Century*, Liverpool Schumacher Lectures, March 20, 1999.
- Gardner, H., (2013), *Multiple Intelligences: Memaksimalkan Potensi dan Kecerdasan Individu dari Masa Kanak-Kanak Hingga Dewasa*, Daras Jakarta
- Goleman, D (1999) *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kollmuss, A. and Agyeman, J. (2002) *Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What Are the Barriers to Pro-Environmental Behavior?* *Environmental Education Research*, 8, 239-260. <http://dx.doi.org/10.1080/13504620220145401>
- Lewin, K (1958). *Group Decision and Social Change*. New York: Holt, Rinehart and Winston. p. 201.
- Meena, M. B., & Alison, M. W. (2009). *Decisions and Dilemmas: Using Writing to Learn Activities to Increase Ecological Literacy*. *Journal of Environmental Education*, 40(3), 13-26. doi: 10.3200/JOEE.40.3.13-26
- Moen, Torill, and Solvberg (2012) *The Power of Words: A Crucial Conversation at the Launch of an Action Research Project*. *U.S.-China Review* 6:557–567.
- Nicodemus, B., & Swabey, L. (2015). *Action research*. In C. V. Angelelli and B. J. Baer (Eds.) *Researching translation and interpreting*. New York: Routledge.
- (15) (PDF) *Action research*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/283025755_Action_research [accessed Mar 01 2020].
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.
- Stringer, Ernest T. 2014. *Action Research*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Wijaya, G. (2018). *Bentuk - Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berwawasan Lingkungan*. *Studi Pustaka*, 6 (4).